

## **ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIMPANG III SIPIN KOTA JAMBI**

**Nabillah Nurul Aprilnisa<sup>1</sup>, Putri Apria Ningsih<sup>2</sup>, Fitri Ana Siregar<sup>3</sup>**  
[nabillahnurul2020@gmail.com](mailto:nabillahnurul2020@gmail.com)<sup>1</sup>, [putriapria8@gmail.com](mailto:putriapria8@gmail.com)<sup>2</sup>, [fitrianasiregar@gmail.com](mailto:fitrianasiregar@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan, dengan fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan ketidaksesuaian dalam pemilihan penerima bantuan. Melalui metode kualitatif, penelitian ini berusaha memahami dampak dari ketidaksesuaian tersebut terhadap kelancaran pelaksanaan program dan mencari solusi untuk meningkatkan akurasi pemilihan peserta PKH. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesadaran penerima bantuan yang tergolong mampu atau tidak miskin dan mengevaluasi efektivitas upaya penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap kriteria penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kelurahan Simpang 3 Sipin belum sepenuhnya berhasil dalam menerapkan prinsip keadilan dan transparansi yang diamanatkan dalam perspektif ekonomi Islam, terbukti dari masih adanya ketidaksesuaian dalam alokasi bantuan PKH. Perubahan status peserta PKH dari tidak mampu menjadi mampu juga berdampak signifikan terhadap keadilan distribusi sumber daya dan stabilitas sosial. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran penerima bantuan PKH, termasuk program pelatihan dan sosialisasi mengenai konsep zakat, muamalah, serta akses ke layanan keuangan Islami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap efisiensi dan keberhasilan PKH dalam konteks pengentasan kemiskinan, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Keluarga Harapan, Ekonomi Islam.

### ***Abstract***

*This study aims to evaluate the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in alleviating poverty, focusing on aspects related to discrepancies in beneficiary selection. Using qualitative methods, this research seeks to understand the impact of these discrepancies on the smooth implementation of the program and to find solutions to improve the accuracy of PKH participant selection. Additionally, this study examines the awareness of beneficiaries who are considered capable or non-poor and evaluates the effectiveness of outreach efforts in increasing their understanding of the criteria for receiving aid. The results show that the Simpang 3 Sipin village has not fully succeeded in implementing the mandated principles of justice and transparency from the perspective of Islamic economics, as evidenced by the ongoing discrepancies in the allocation of PKH aid. Changes in the status of PKH participants from incapable to capable also significantly impact the fair distribution of resources and social stability. Several efforts have been made to raise awareness among PKH beneficiaries, including training and socialization programs on the concepts of zakat, muamalah, and access to Islamic financial services. This study aims to provide a deeper understanding of the efficiency and success of PKH in the context of poverty alleviation, particularly from the perspective of Islamic economics.*

**Keywords :** Effectiveness, Family Hope, Islamic economic.

## PENDAHULUAN

Dalam banyak negara berkembang, terdapat dua masalah besar, yaitu kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, serta tingkat kemiskinan yang mencakup jumlah orang di bawah garis kemiskinan 1 Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata di suatu daerah.

Rendahnya pendapatan tidak hanya berdampak pada ketidakcukupan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga menghambat pemenuhan standar hidup rata-rata, termasuk kesehatan dan pendidikan masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia.<sup>2</sup>

BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah bantuan tunai sementara untuk masyarakat miskin atau terdampak situasi darurat, tanpa syarat khusus, sedangkan PKH (Program Keluarga Harapan) adalah bantuan bersyarat berkelanjutan yang ditujukan untuk keluarga miskin, dengan syarat penerima harus memenuhi kewajiban seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin<sup>3</sup>

Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengentasan masyarakat miskin untuk mandiri, baik secara ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga memerlukan kebijakan memberdayakan masyarakat miskin tersebut.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Bentuknya berupa bantuan tunai yang diberikan secara berkala kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, atau lanjut usia. Penerima bantuan harus memenuhi kewajiban seperti memeriksakan kesehatan ibu dan anak secara rutin dan memastikan anak-anak mereka bersekolah.

Dalam upaya tersebut pemerintahan mengadopsi strategi peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program, seperti program berbasis perlindungan sosial yang melibatkan inisiatif seperti JAMKESMAS, RASKIN, BSM, dan PKH.<sup>4</sup> Program-program ini, yang mulai diperkenalkan pada tahun 2007, secara khusus ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program berbasis pemberdayaan masyarakat seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan pemberdayaan usaha mikro melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat). Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial diartikan sebagai serangkaian upaya yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko yang timbul akibat guncangan serta kerentanan sosial.<sup>5</sup>

Dengan menggabungkan strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah diperkenalkan sebagai langkah strategis dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia. Program ini mengimplementasikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) dengan tujuan utama untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin, dan secara simultan mengatasi rantai kemiskinan yang telah berlangsung, hal tersebut dapat dikaji melalui perspektif Ekonomi

Syariah.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini mencakup aspek seperti larangan riba (bunga), keadilan, transparansi, dan etika dalam kegiatan ekonomi. Investasi dan keuangan syariah mengikuti ketentuan hukum Islam, menciptakan suatu sistem yang mempromosikan keberlanjutan dan keadilan dalam distribusi kekayaan.<sup>6</sup> Ekonomi syariah juga mengharamkan praktik-praktik spekulatif yang tidak jelas dan mendukung pemberdayaan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Instrumen keuangan seperti sukuk, yang sering digunakan dalam ekonomi syariah, menggantikan obligasi konvensional. Selain itu, dalam ekonomi syariah, usaha-usaha harus sesuai dengan prinsip moral dan etika Islam, termasuk dalam hal produksi dan pemasaran. Dalam sistem ini, distribusi kekayaan diupayakan agar lebih merata, dan konsep zakat menjadi salah satu instrumen redistribusi yang penting.<sup>7</sup> Dengan menggabungkan aspek keuangan, sosial, dan moral, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif ekonomi syariah, Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sosial serupa harus dinilai dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam terkait keadilan dan pemberdayaan. Bantuan tersebut sebaiknya tidak hanya bersifat pemberian semata, tetapi juga mendukung upaya untuk memajukan ekonomi masyarakat penerima. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan PKH tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal transparansi, keadilan, dan penghindaran riba. Bantuan seharusnya tidak menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan, melainkan memberikan dorongan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan atau dukungan untuk usaha kecil. Selain itu, pemakaian dana bantuan PKH perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan tidak terjadi penyalahgunaan atau pemborosan. Dengan demikian, bantuan seperti PKH dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga mendorong peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, sebagai langkah strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai lapisan masyarakat.<sup>8</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) menetapkan sasaran penerima bantuan yang terfokus pada keluarga miskin, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak-anak. Dalam konteks ini, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak menjadi kriteria utama.

Pentingnya keluarga sebagai unit yang relevan dalam PKH terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memberikan dukungan kepada keluarga yang memerlukan, tidak hanya dalam aspek finansial tetapi juga dalam aspek-aspek penting seperti pendidikan dan kesehatan.<sup>9</sup> Dengan memfokuskan bantuan pada keluarga, program ini berusaha menciptakan dampak positif jangka panjang pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan peluang bagi setiap anggota keluarga. Dalam konteks analisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan, fokus pada penerima manfaat di Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Program ini memilih memberikan bantuan dana tunai kepada pengurus keluarga, yang umumnya adalah perempuan dewasa seperti ibu, nenek, bibi, atau kakak perempuan. Meskipun demikian, dalam keadaan khusus, kepala keluarga dapat menjadi penerima bantuan.

Dari data terbaru, diketahui bahwa 522 keluarga di Kelurahan tersebut tergolong miskin. Namun, tidak semua keluarga miskin ini menjadi penerima manfaat PKH. Pusat melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Pendataan Sosial-Ekonomi dengan 10 variabel. Sebagai bagian dari analisis efektivitas, perlu dipertimbangkan bagaimana PKH dapat lebih tepat sasaran dalam mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat. Faktor-faktor seperti kriteria seleksi, pemberian bantuan kepada pengurus keluarga, dan keterlibatan pusat dalam pengambilan keputusan perlu dieksplorasi untuk menilai sejauh mana PKH dapat menjadi solusi yang efektif dalam konteks pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam konteks analisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi, pertimbangan mengenai keterlibatan pusat dalam seleksi calon penerima bantuan menjadi aspek yang perlu ditinjau. Meskipun 522 keluarga tergolong miskin, mekanisme seleksi yang dilakukan oleh pusat menentukan siapa yang menjadi penerima manfaat PKH. Hal ini mengacu pada kriteria pengukuran kemiskinan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Pendataan Sosial- Ekonomi dengan 10 variabel.

Tabel 1.1 ketentuan layak atau tidak dalam mendapat PKH

No	Keterangan
1	Pendapatan Keluarga
2	Jumlah tanggungan dalam keluarga
3	Kondisi Kesehatan
4	Status Pekerjaan
5	Akses Air Bersih
6	Akses Sanitasi
7	Rumah dan lingkungan tempat tinggal
8	Keberlangsungan pendidikan anak
9	Kepemilikan aset
10	Kondisi Sosial Ekonomi

*Sumber : BPS Pendataan Sosial-Ekonomi 2023<sup>10</sup>*

Sebagai langkah lanjutan, perlu diperinci bagaimana faktor-faktor ekonomi Islam dapat diintegrasikan dalam program ini. Analisis dapat mencakup aspek-aspek seperti keadilan distributif, partisipasi aktif masyarakat, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk memastikan bahwa PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memfokuskan studi pada peserta PKH di Kelurahan Simpang III Sipin, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang sejauh mana PKH telah mencapai tujuannya dalam pengentasan kemiskinan, terutama ketika dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

Prosedur untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dengan pendaftaran di kantor pelayanan sosial setempat, di mana calon penerima mengisi formulir aplikasi dan menyertakan dokumen pendukung. Selanjutnya, data calon penerima diverifikasi oleh petugas terkait untuk memastikan kelayakan mereka berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh program. Setelah verifikasi selesai, penerima PKH ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhan, seperti keberadaan ibu hamil, 10 Data Kategori mendapat bantuan PKH dari pendapatan sosial dan ekonomi BPS 2023 anak usia dini, atau penyandang disabilitas berat. Calon penerima yang dinyatakan layak akan mengikuti sesi

orientasi dan menandatangani kontrak, kemudian bantuan tunai PKH akan dicairkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan membentuk kerangka pemahaman yang komprehensif tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Melalui berbagai pendekatan, seperti analisis efektivitas dari perspektif ekonomi Islam oleh Kartiawati (2022) dan fokus Slamet Riyadi (2016) pada implementasi PKH terhadap keluarga sangat miskin, serta penelitian Hajar Hari Antoro (2018) yang menyoroti aspek pelaksanaan PKH di bidang pendidikan, pemahaman mendalam tentang dampak dan implementasi program tersebut dapat diungkapkan. Selain itu, penelitian Sri Rahayu (2018) di Desa Batang Anai, Sarolangun, menunjukkan pentingnya konteks lokal dalam mengevaluasi efektivitas program tersebut. Sementara itu, analisis keterpaduan PKH dengan program pembangunan lainnya oleh Nopriansyah Dwisetio (2021) memberikan wawasan tentang bagaimana PKH dapat berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui kerangka analisis yang beragam ini, para peneliti telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dan meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan kerangka pemahaman yang telah diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengangkat judul serupa yang mengeksplorasi aspek yang sama namun dengan pendekatan atau konteks yang berbeda. Sebagai contoh, penulis dapat memilih untuk meneliti dengan fokus pada analisis dari sudut pandang sosial atau lingkungan, atau mungkin mengeksplorasi dampak PKH terhadap pemberdayaan perempuan dalam konteks spesifik suatu daerah. Dengan demikian, penelitian baru ini dapat memberikan kontribusi tambahan dalam memperluas pemahaman tentang efektivitas dan implikasi PKH untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sentral dalam kerangka kerja ini adalah kepatuhan terhadap syariah, yang melibatkan larangan terhadap riba, spekulasi berlebihan, dan praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Prinsip keadilan mendominasi, dengan perhatian khusus pada distribusi kekayaan yang adil dan partisipasi aktif dalam membantu mereka yang kurang mampu melalui zakat dan sedekah. Konsep kepemilikan dan usaha halal menjadi landasan, menghindari kegiatan yang dianggap haram. Kemitraan dan kebersamaan dalam aktivitas ekonomi menekankan solidaritas sosial, sementara larangan riba menegaskan pentingnya keadilan ekonomi. Perlindungan hak individu, transparansi dalam bisnis, dan penghindaran pemborosan sumber daya juga menjadi nilai inti. Ekonomi Islam, dengan demikian, menawarkan suatu paradigma ekonomi yang tidak hanya memperhatikan aspek materi tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika dan spiritual dalam upaya mencapai keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Tabel 1.2 Jumlah penerima PKH 2029-2023

No	Tahun	Jumlah Penerima PKH
1	2019	552
2	2020	552
3	2021	552
4	2022	552
5	2023	522

*Sumber : Data Kelurahan Sipin<sup>12</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ngateno, Sekretaris Kelurahan Sipin, terjadi ketidaksesuaian dalam pendataan rumah tangga miskin pada tahun 2023 pada saat ini melalui informasi data kepala Kelurahan Sipin sekitar 522 KK (Kepala Keluarga) Meskipun awalnya terkategori tidak mampu, pada pencairan bantuan status peserta

berubah menjadi mampu, menyebabkan masalah yang sulit diatasi tanpa dukungan perubahan dari kantor pusat.

Tabel 1.3 Kategori Penerima PKH

No	Keterangan	Data Empiris
1	Pendapatan Keluarga Rendah	Distribusi tidak merata
2	Jumlah tanggungan dalam keluarga masih terdapat pengangguran	Dampak PKH masih kurang dalam menurunkan kemiskinan
3	Kondisi Kesehatan	Banyak yang tidak mendapat perawatan layak
4	Status Pekerjaan pengangguran	Ketergantungan tinggi
5	Akses Air Bersih	Terpenuhi dari PDAM
6	Akses Sanitasi	Banyak yang tidak mendapat PKH status sanitasi buruk
7	Rumah dan lingkungan tempat tinggal	Ramah penduduk
8	Keberlangsungan pendidikan anak	Baik
9	Kepemilikan aset	Tidak ada
10	Kondisi Sosial Ekonomi	Terdapat skala sederhana kebawah

*Sumber : BPS Kota Jambi bagian PKH 2023<sup>13</sup>*

Selanjutnya, Ibu Siti Asiah, pendamping PKH di Kelurahan Sipin Kota Jambi mengungkapkan bahwa beberapa penerima bantuan PKH yang seharusnya tidak miskin belum menyadari perlu melepas bantuan tersebut. Diperlukan penyuluhan dan pemahaman khusus terhadap tujuan PKH dan kriteria penerima bantuan. Dari wawancara dengan Ibu Fitri, peserta PKH di Sipin terungkap bahwa ia menerima bantuan sejak tahun 2019 sebagai peserta pendidikan setara SMA/Sederajat dengan nominal bantuan Rp2.000.000 per tahun. Teori ekonomi Islam yang relevan untuk analisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan adalah bahwa ekonomi Islam bertujuan mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata melalui prinsip zakat, infak, dan sedekah. Tiga indikator yang dapat digunakan berdasarkan teori ini adalah keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan peningkatan kesejahteraan. Keadilan sosial mengukur sejauh mana PKH mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat, sedangkan distribusi kekayaan melihat dampak program ini terhadap redistribusi pendapatan kepada masyarakat kurang mampu. Terakhir, peningkatan kesejahteraan menilai bagaimana PKH mempengaruhi kesejahteraan materi dan spiritual peserta program, mencerminkan tujuan holistik ekonomi Islam dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil.

Dari latar belakang tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan program PKH menghadapi sejumlah masalah, termasuk ketidaksesuaian dalam pemilihan penerima bantuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian. “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam” (Studi Pada Peserta PKH di Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi)” peneliti ingin mengevaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan, khususnya dari perspektif ekonomi Islam Prinsip ekonomi Islam yang mencakup konsep- konsep seperti keadilan, keberlanjutan, dan distribusi yang

merata.

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), evaluasi efektivitasnya perlu mempertimbangkan sejauh mana program tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip ini. Misalnya, apakah distribusi bantuan bersifat adil dan merata, apakah program tersebut memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, dan sejauh mana implementasinya sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam

#### **A. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek kritis di Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Jambi.

1. Melihat bagaimana penerima bantuan PKH dapat mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dari perspektif ekonomi Islam
2. Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran penerima bantuan PKH dalam pengelolaan dana, dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek yang memandu fokus penelitian dan memberikan kerangka waktu serta wilayah tertentu. Pertama, penelitian ini terbatas pada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Jambi, dengan periode penerimaan bantuan dari tahun 2021 hingga 2023 Kedua, pembatasan kriteria responden melibatkan individu yang memenuhi syarat sebagai penerima PKH, ibu hamil/memiliki anak usia dini, dan memiliki anak yang masih sekolah. Ketiga, fokus penelitian difokuskan pada evaluasi efektivitas PKH dalam mengatasi kemiskinan, dengan penekanan pada aspek ekonomi Islam. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan relevan terkait dampak program bantuan tersebut di lokasi dan periode yang ditentukan.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pemilihan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam ?
2. Apa saja dampak dari perubahan status peserta PKH dari tidak mampu menjadi mampu melalui perspektif ekonomi Islam ?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran penerima bantuan PKH dalam perspektif ekonomi Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan, dengan fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan ketidaksesuaian dalam pemilihan penerima bantuan. Penelitian bertujuan untuk memahami dampak dari ketidaksesuaian tersebut terhadap kelancaran pelaksanaan program dan mencari solusi untuk meningkatkan akurasi pemilihan peserta PKH. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesadaran penerima bantuan yang tergolong mampu/tidak miskin dan mengevaluasi efektivitas upaya penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap kriteria penerima bantuan. Dengan merinci aspek-aspek ini, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap efisiensi dan keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam konteks pengentasan kemiskinan, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung

maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang terkait dengan program keluarga harapan atau program pengentasan kemiskinan dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada dimasyarakat.

b) Bagi Pendamping PKH

Sebagai salah satu rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan Pendampingan kepada penerima PKH.

c) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurai beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Penelitian lapangan yang bersifat kualitatif sering menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis teks atau dokumen. Pendekatan ini lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena dan makna yang terkandung dalam konteks sosial yang sedang diteliti.<sup>39</sup> Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan atau field research yang menggali secara mendalam mengenai latar belakang, interaksi, dampak, dan dinamika lingkungan sosial peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Jambi.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Jambi, dengan objek penelitian berfokus pada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting (kondisi yang alamiah) peneliti sebagai instrumen penelitian.<sup>40</sup> Sumber data yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisis kebutuhan pengumpulan data tersebut agar dapat dijadikan acuan oleh penulis, maka dari itu peneliti jabarkan mengenai sumber data yang digunakan sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>41</sup> Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 10 peserta PKH yaitu Ibu F, Ibu Sr, Ibu Sp, Ibu Rk, Ibu Yt, Ibu Y, Ibu J, Ibu Jd, Ibu Wr, dan Ibu Su. Ibu Eka selaku pendamping PKH, Bapak Endrizal, S.ST selaku lurah simpang III Sipin, Bapak Amri Amir dan Bapak Faisal selaku Ketua RT 18 Kelurahan Simpang III Sipin. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Purposive Sampling dengan kriteria sebagai berikut di Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Jambi:

a) Individu penerima bantuan PKH pada tahun 2019-2023.

b) Ibu hamil/memiliki anak usia dini.

c) Memiliki anak yang masih sekolah.

Kriteria ini diharapkan membantu peneliti dalam mengevaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan dengan perspektif ekonomi Islam di lokasi tersebut.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan digunakan sebagai sumber penunjang dalam penelitian yang menggambarkan dan menguraikan situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Maksudnya data sekunder digunakan peneliti untuk memahami masalah yang akan diteliti tentang efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari perseptif ekonomi Islam.

Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan program pemerintah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, program keluarga harapan (PKH), kemiskinan, dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan.<sup>42</sup> Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang diwawancara/narasumber dan pewawancara/peneliti untuk mendapat pemahaman akan pandangan seseorang (makna subjektif) terkait dengan hal atau kegiatan tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data/informasi dimana yang menjadi pewawancara/peneliti mengemukakan pertanyaan pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancara. <sup>43</sup> Peneliti menggunakan panduan bentuk wawancara yang semi terstruktur di mana hanya pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaan diungkapkan pada saat terjadinya wawancara, sehingga bukan perangkat pertanyaan ilmiah yang diucapkan sama persis untuk setiap wawancara, namun ada beberapa pertanyaan umum untuk mengejar cakupan topik yang luas. Penulis akan mewawancarai 10 peserta PKH yaitu Ibu F, Ibu Sr, Ibu Sp, Ibu Rk, Ibu Yt, Ibu Y, Ibu J, Ibu Jd, Ibu Wr, dan Ibu Su. Ibu Eka selaku pendamping PKH, Bapak Endrizal, S.ST selaku lurah simpang III Sipin, Bapak Amri Amir dan Bapak Faisal selaku Ketua RT 18 Kelurahan Simpang III Sipin.

### 2) Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis <sup>44</sup>. Penelitian ini bersifat non partisipatif, menggunakan teknik untuk mengamati dampak Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum dan sesudah peserta PKH di Simpang III Sipin mendapatkan bantuan.

Peserta PKH mencakup Ibu F, Ibu Sr, Ibu Sp, Ibu Rk, Ibu Yt, Ibu Y, Ibu J, Ibu Jd, Ibu Wr, dan Ibu Su. Sementara itu, Ibu Eka bertindak sebagai pendamping PKH, dan Bapak Endrizal, S.ST menjabat sebagai lurah Simpang III Sipin. Bapak Amri Amir dan Bapak Faisal menjadi Ketua RT 18 di Kelurahan Simpang III Sipin.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan program pemerintah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), kemiskinan, dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>45</sup>

## **E. Metode Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan Keabsahan Data Untuk memperoleh data yang terpercaya dan dapat dipercaya.<sup>46</sup> Maka penelitian melakukan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria. Dalam penelitian kualitatif upaya pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan lewat empat cara, yaitu:

- a) Perpanjangan keikutsertaan Pelaksanaan perpanjangan keikutsertaan dilakukan lewat keikutsertaan peneliti di lokasi secara langsung dan cukup lama. <sup>47</sup> Dalam upaya mendeteksi dan menghitungkan penyimpangan yang mungkin mengurangi keabsahan data. Karena kesalahan penilaian data (data distorion) oleh peneliti atau responden disengaja atau tidak sengaja.
- b) Diskusi dengan teman sejawat Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data yang diterima benar-benar real dan bukan semata persepsi sepihak dari peneliti atau informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan mendapat sumbangan, masukan, dan sarana yang berharga dan konstruktif dalam meninjau keabsahan data.<sup>48</sup>
- c) Ketekunan pengamatan Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam penelitian. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi berbagai distorsi data yang timbul akibat keterburuan peneliti untuk menilai suatu persoalan. Adapun distorsi data yang timbul dari kesalahan responden yang memberikan data secara tidak benar, misalnya berdusta. Menipu, dan berpura-pura.

### 1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data pokok. Untuk keperluan pengecekan reabilitas data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang diperoleh dari berbagai informasi<sup>49</sup>. Terdapat empat macam teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:<sup>50</sup>

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatanya secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatannya sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, pemerintah.

## **F. Metode Analisis Data**

Metode Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas yaitu :<sup>51</sup>

### 1) Reduksi Data

Reduksi data Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, setelah itu dicari tema dan polanya.

### 2) Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.<sup>52</sup> Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tahap penyajian data merupakan suatu tahap lanjutan analisis dimana peneliti akan menyajikan temuan penelitian berupa suatu kategori atau pengelompokan.

### 3) Verifikasi data

Verifikasi data adalah upaya membuktikan kembali benar atau tidaknya kesimpulan yang dibuat, sesuai atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataan. Verifikasi dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengecekan ulang, atau dengan melakukan triangulasi. dapat dilakukan dengan merekomendasi kepada pelaku riset lain untuk mengulangi riset yang telah dilakukan itu terhadap masalah yang sama. Apabila terbukti temuan-temuan yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan berarti kesimpulan itu terverifikasi<sup>53</sup>

Kesimpulannya, dalam melakukan penelitian kualitatif, terdapat tiga tahapan penting yang perlu dilakukan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dengan mencari tema dan polanya. Tahap ini membantu peneliti untuk mengelompokkan informasi yang relevan dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data. Setelah itu, data yang telah direduksi akan disajikan dengan menggunakan berbagai metode, seperti uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi terhadap data. Tahap terakhir adalah verifikasi data, yang dilakukan untuk memastikan kebenaran kesimpulan yang telah dibuat. Verifikasi dapat dilakukan melalui pengecekan ulang atau triangulasi, serta dapat melibatkan pelaku riset lain untuk mengulangi riset yang sama. Dengan melakukan ketiga tahapan ini secara cermat, penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Kelurahan Simpang III Sipin**

Kelurahan Simpang III Sipin merupakan salah satu dari enam kelurahan yang ada di Kecamatan Telanaipura. Saat ini dipimpin oleh lurah bernama Bapak Endrizal.S.ST. TidakPada masa sebelum kemerdekaan dan beberapa tahun setelahnya, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kelurahan Simpang III Sipin mungkin terdiri dari beberapa kampung yang dihuni oleh komunitas lokal. Masyarakat di wilayah ini menjalani kehidupan agraris, dengan kegiatan utama bertani dan berdagang. Dengan berjalananya waktu dan perkembangan administratif, wilayah-wilayah di Kota Jambi mulai ditata lebih sistematis. Pada era 1970-an hingga 1980-an, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai pembentukan dan penataan wilayah administratif, beberapa desa atau kampung di wilayah perkotaan diubah statusnya menjadi kelurahan.Simpang III Sipin merupakan salah satu wilayah yang mengalami perubahan status ini, menjadi sebuah kelurahan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta administrasi kependudukan.

Pada masa Orde Baru, struktur pemerintahan diperkuat hingga ke tingkat kelurahan. Lurah yang ditunjuk bertugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan, mengoordinasikan pembangunan di tingkat lokal, serta melaksanakan berbagai program

dari pemerintah pusat dan daerah. Kelurahan Simpang III Sipin, seperti banyak kelurahan lainnya di Indonesia, berperan penting dalam program-program pembangunan nasional, termasuk program Keluarga Berencana (KB), program kesehatan masyarakat, dan proyek pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan dimulainya era Reformasi pada akhir 1990-an, terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah kelurahan. Di era ini, Kelurahan Simpang III Sipin mengalami peningkatan peran dalam pengelolaan sumber daya lokal dan pelayanan publik. Pemerintah kelurahan lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Saat ini, Kelurahan Simpang III Sipin terus berkembang seiring dengan pertumbuhan Kota Jambi. Berbagai program pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi aktif warga dalam kegiatan kelurahan, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), gotong royong, dan kegiatan keagamaan, membantu memperkuat kohesi sosial dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Jambi, memiliki luas 22,51 km<sup>2</sup>. Adapun rincian luas wilayah per kelurahan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Telanaipura: 1,29 km<sup>2</sup>
- 2) Kelurahan Simpang IV Sipin: 1,53 km<sup>2</sup>
- 3) Kelurahan Pematang Sulur: 2,98 km<sup>2</sup>
- 4) Kelurahan Buluran Kenali: 2,06 km<sup>2</sup>
- 5) Kelurahan Penyengat Rendah: 12,31 km<sup>2</sup>
- 6) Kelurahan Teluk Kenali: 2,34 km<sup>2</sup>

Jarak dari masing-masing kelurahan ke pusat kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Telanaipura: 0,0 km
- 2) Kelurahan Simpang IV Sipin: 2,0 km
- 3) Kelurahan Pematang Sulur: 3,5 km
- 4) Kelurahan Buluran Kenali: 1,5 km
- 5) Kelurahan Penyengat Rendah: 5,0 km
- 6) Kelurahan Teluk Kenali: 3,5 km

Secara administratif, wilayah Kecamatan Kota Baru dibatasi oleh:

- 1) Bagian selatan: Kecamatan Alam Barajo
- 2) Bagian utara: Sungai Batanghari
- 3) Bagian timur: Kecamatan Danau Sipin
- 4) Bagian barat: Kabupaten Batanghari

Secara geografis, Kecamatan Kota Baru memiliki bentuk wilayah yang datar dan sedikit berbukit. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman penduduk.

## **B. Visi dan Misi**

### **a) Visi Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Jambi**

"Mewujudkan Kelurahan Simpang III Sipin yang bersih, aman, dan sejahtera melalui pelayanan publik yang prima dan partisipasi aktif masyarakat."

### **b) Misi Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Jambi**

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik:

- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
  - Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur kelurahan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik.
- 2) Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
- Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
  - Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling dan patroli bersama.

3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:

    - Mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah.
    - Mengadakan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, seperti bantuan untuk keluarga kurang mampu dan peningkatan fasilitas umum.

4) Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan:

      - Menggalakkan program kebersihan lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
      - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui sosialisasi dan edukasi.

5) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:

        - Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kelurahan.
        - Mengembangkan forum-forum komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan masukan.

Dengan visi dan misi ini, Kelurahan Simpang III Sipin berkomitmen untuk membangun lingkungan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.

**C. Struktur Organisasi Kelurahan Simpang III**

Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi sebuah kelurahan, termasuk Kelurahan Simpang III Sipin:

        - a) Lurah: Pemimpin tertinggi di kelurahan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di wilayah kelurahannya. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
        - b) Sekretaris Kelurahan: Bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi dan kesekretariatan, mengelola arsip, dan memastikan kelancaran kegiatan kantor kelurahan.
        - c) Kepala Seksi Pemerintahan: Bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan, termasuk pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, dan berbagai administrasi kependudukan lainnya.
        - d) Kepala Seksi Pembangunan: Mengurus program-program pembangunan di kelurahan, termasuk perbaikan infrastruktur, proyek-proyek pembangunan, dan penataan lingkungan.
        - e) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra): Menangani masalah-masalah sosial, termasuk bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
        - f) Kepala Seksi Pelayanan Umum: Bertanggung jawab atas layanan umum kepada masyarakat seperti perizinan, informasi publik, dan pelayanan administrasi lainnya.
        - g) Staff Administrasi dan Umum: Mendukung berbagai kegiatan administrasi, mengelola

dokumen, serta membantu operasional sehari-hari di kantor kelurahan.

- h) Ketua RW dan RT: Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari struktur non-formal yang membantu Lurah dalam mengkoordinasikan kegiatan di tingkat yang lebih kecil.
- i) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK): Termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, dan lain-lain yang membantu dalam pelaksanaan program-program pemerintah di masyarakat.

Ini adalah struktur dasar yang biasanya ditemukan di kelurahan di Indonesia, termasuk di Kelurahan Simpang III Sipin. Struktur ini bisa sedikit berbeda tergantung pada kebutuhan dan kebijakan daerah masing-masing.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi



## D. Hasil dan Pembahasan

### a) Hasil Penelitian

#### 1. Proses pemilihan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam

Proses pemilihan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan beberapa tahapan penting, seperti pendataan menggunakan basis data terpadu kesejahteraan sosial (BDT), verifikasi dan validasi untuk memastikan kelayakan penerima, serta evaluasi tahunan. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mencapai keluarga yang benar-benar membutuhkan. Keakuratan dan transparansi dalam pemilihan penerima sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial sangat relevan dalam konteks PKH. Prinsip keadilan menuntut distribusi bantuan yang adil dan bebas dari korupsi, sementara prinsip kebersamaan mendorong partisipasi kolektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam juga menggarisbawahi pentingnya distribusi kekayaan yang merata, yang tercermin dalam program-program seperti PKH.

Jika proses pemilihan penerima bantuan dilakukan dengan tepat dan akurat, dampaknya akan sangat positif terhadap pengentasan kemiskinan. Bantuan yang tepat sasaran akan meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), misalnya melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, proses yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan yang

lebih merata sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Tabel 4.1 Penerima PKH Klaster – Klaster III

No.	Tahun.	Klaster I	Klaster II	Klaster III	Pertumbuhan (%)
1	2019	552	421	351	12
2	2020	552	421	351	12
3	2021	552	421	351	12
4	2022	552	421	351	12
5	2023	526	300	351	12

Sumber : Hasil Observasi pada 1 Juni 2024

Berikut adalah informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Pihak kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi:

Selama tahun 2019 sampai 2023, jumlah KPM PKH memang berfluktuasi dan tidak stabil. Hal ini disebabkan karena PKH disalurkan berdasarkan kriteria atau syarat tertentu. Jika tahun ini keluarga A masih memenuhi syarat untuk menerima PKH, tetapi tahun depan sudah tidak memenuhi syarat, maka PKH tidak akan diberikan lagi.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pendamping sosial PKH Kecamatan Danau Sipin yang juga menyatakan bahwa jumlah penerima PKH setiap tahunnya berbeda, karena PKH bukan bantuan seumur hidup, tetapi bantuan bersyarat. PKH diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat, seperti adanya balita, lansia, atau anak-anak sekolah. Jika syarat tersebut hilang, maka bantuan tidak akan diberikan lagi. Misalnya, jika ada yang meninggal atau sudah lulus sekolah.

Sejalan dengan hasil observasi dan wawancara dari bapak Efrizal selaku kepala lurah menyatakan sebagai berikut :

"Proses pemilihan penerima PKH di kelurahan kami dilakukan melalui serangkaian tahapan yang cermat. Kami memulai dengan pendataan keluarga yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian, data tersebut diverifikasi untuk memastikan keakuratannya sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH."<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Danau Sipin harus memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria. Adapun syarat-syarat atau kriteria KPM PKH yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Komponen kesehatan

1. Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut Ibu hamil/nifas/menyusui
2. Anak usia dini dengan rentang 0-6 tahun yang belum bersekolah.
3. Komponen pendidikan

Kriteria penerima PKH berdasarkan komponen pendidikan adalah anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi sederajat, SLTP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

b) Komponen kesejahteraan sosial

Kriteria penerima PKH berdasarkan komponen kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- a. Lanjut usia (lansia) yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.
- b. Penyandang disabilitas.

Kriteria tersebut menjadi salah satu syarat bagi setiap KPM di Kecamatan Danau Teluk untuk menerima bantuan PKH. Bantuan PKH ini terdiri dari dua jenis yaitu bantuan tetap untuk setiap keluarga yang terdiri dari bantuan regular sebesar Rp.550.000,-/keluarga/tahun dan PKH Akses sebesar Rp.1.000.000,-/keluarga/tahun. Artinya bantuan PKH ini diterima dalam bentuk uang yang langsung dikirim oleh Kementerian Sosial ke rekening bank milik masing-masing KPM. Apabila KPM PKH tidak memiliki rekening, maka bantuan PKH dapat diambil atau dicairkan melalui kantor pos. Penyaluran dana PKH ini dilakukan secara bertahap, dimana dalam setiap 1 tahun ada 4 tahap penyaluran, sehingga bantuan PKH ini akan cair dalam kurun waktu 3 bulan sekali yang dimulai dari periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.

Sejalan dengan hasil wawancara dari Bapak Babinsa Mardianto yaitu sebagai berikut:

"Dalam perspektif ekonomi Islam, proses pemilihan penerima bantuan PKH haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan prinsip keadilan serta kejujuran. Seleksi yang tepat akan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Prinsip Islam mengajarkan bahwa distribusi harta harus adil dan tepat sasaran untuk mengurangi kesenjangan sosial. Jika proses seleksi ini tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas program akan berkurang, karena bantuan mungkin saja jatuh kepada mereka yang kurang berhak, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan. Oleh karena itu, transparansi dan akurasi data sangat penting dalam proses ini untuk mencapai tujuan utama pengentasan kemiskinan."<sup>55</sup>

Ibn Khaldun, seorang intelektual besar dari abad ke-14, menciptakan teori yang revolusioner dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Karyanya yang paling terkenal, "Muqaddimah" atau "Pendahuluan", yang selesai ditulis pada tahun 1377 M, merupakan landasan teori ekonomi Islam yang mendalam dan berkelanjutan. Dalam "Muqaddimah", Ibn Khaldun mengembangkan konsep-konsep seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, kemandirian ekonomi, peran negara yang aktif, dan pengelolaan sumber daya alam. Teorinya tidak hanya menguraikan bagaimana ekonomi seharusnya berfungsi secara adil dan berkelanjutan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan sosial Islam dalam pengelolaan ekonomi. Ibn Khaldun menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur pasar dan memastikan bahwa perdagangan dilakukan secara adil, sementara masyarakat harus mematuhi prinsip-prinsip etika dalam berdagang. Selain itu, ia menyarankan agar kekayaan didistribusikan secara merata melalui zakat dan infaq, untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Pemikirannya tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memberikan landasan penting bagi perkembangan ekonomi Islam modern yang berorientasi pada keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan lingkungan.

Pernyataan dari Bapak Babinsa Mardianto sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan distribusi yang adil dalam pengelolaan harta. Dalam konteks ekonomi syariah, distribusi sumber daya dan bantuan harus dilakukan dengan transparan dan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya, agar dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Prinsip-prinsip ini mengarahkan agar bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada yang memang paling berhak dan membutuhkan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyaluran yang tidak tepat. Dengan demikian, pendekatan yang hati-hati dan berdasarkan prinsip keadilan yang diterapkan dalam proses seleksi PKH

sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Sejalan dengan hasil wawancara dari Bapak Efrizal yaitu sebagai berikut :

"Proses pemilihan penerima bantuan PKH di kelurahan kami dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah pertama adalah pendataan melalui survei yang melibatkan kader-kader di tingkat RT dan RW. Mereka mengumpulkan data mengenai kondisi ekonomi dan sosial warga, termasuk pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi tempat tinggal."<sup>56</sup>

Pernyataan dari Bapak Efrizal mengenai proses pemilihan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan adanya upaya yang sistematis dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil dan transparan, dengan memperhatikan kebutuhan sebenarnya dari penerima bantuan. Langkah-langkah yang dijelaskan, seperti pendataan melalui survei yang melibatkan kader-kader di tingkat RT dan RW, merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Prinsip kehati-hatian dan berdasarkan pedoman pemerintah dalam proses seleksi juga mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan yang baik dan efisien, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa bantuan yang disalurkan dapat mencapai tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan prinsip-prinsip redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam.

Sejalan dengan hasil wawancara dari Bapak Pahrul Rozi yaitu sebagai berikut :

"Setelah data dikumpulkan, kami melakukan verifikasi melalui kunjungan lapangan. Tim dari kelurahan akan memeriksa langsung kondisi keluarga yang terdaftar untuk memastikan bahwa mereka memang memenuhi kriteria sebagai keluarga kurang mampu. Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial untuk memastikan data yang kami miliki sesuai dengan kondisi sebenarnya."<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fahrul Rozi, proses pemilihan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti pedoman yang ditetapkan pemerintah. Tahapan awal adalah pendataan melalui survei oleh kader-kader di tingkat RT dan RW, yang mengumpulkan data tentang kondisi ekonomi dan sosial warga, termasuk pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi tempat tinggal.

Selanjutnya, data yang terkumpul diverifikasi melalui kunjungan lapangan oleh tim dari kelurahan. Mereka memeriksa langsung kondisi keluarga yang terdaftar untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai keluarga kurang mampu. Kerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial dilakukan untuk memastikan data yang dimiliki sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Proses ini terkait erat dengan syarat PKH yang mengharuskan penerima bantuan memenuhi kriteria pendapatan dan kondisi sosial tertentu. Melalui pendataan, verifikasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, proses seleksi penerima bantuan PKH dapat memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Namun berbeda dengan hasil wawancara dan Observasi bersama Ibu Dahlia selaku warga setempat yaitu :

"Sebenarnya, program PKH ini sangat membantu banyak keluarga kurang mampu di sini, terutama dalam hal kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Namun, saya melihat ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Ada beberapa keluarga yang sebenarnya tergolong mampu tetapi tetap mendapatkan bantuan PKH."<sup>58</sup>

Sejalan dengan hasil wawancara dari Ibu Titik Sutisna yaitu sebagai berikut :

"Saya tahu ada beberapa keluarga yang kondisi ekonominya cukup baik, bahkan ada yang memiliki usaha sendiri dan penghasilan tetap. Namun, mereka tetap menerima bantuan PKH. Saya menduga hal ini terjadi karena salah satu anggota keluarganya memiliki hubungan dekat dengan aparat kelurahan."<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dahlia dan Ibu Titik Sutisna, terdapat pandangan beragam mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lingkungan mereka. Ibu Dahlia mengapresiasi program PKH yang dinilai sangat membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Bantuan ini dianggap sebagai upaya positif pemerintah dalam meringankan beban hidup masyarakat miskin. Namun, Ibu Dahlia juga mencatat adanya masalah dalam pelaksanaannya. Ia mengamati bahwa beberapa keluarga yang sebenarnya tergolong mampu justru mendapatkan bantuan PKH. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Pengamatan ini sejalan dengan temuan Ibu Titik Sutisna yang juga menyatakan bahwa ada beberapa keluarga dengan kondisi ekonomi yang cukup baik—bahkan memiliki usaha sendiri dan penghasilan tetap—tetapi menerima bantuan PKH. Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya hubungan dekat antara keluarga penerima bantuan dengan aparat kelurahan.

Isu ketidakadilan dan penyimpangan dalam penyaluran bantuan PKH ini dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan ('adl), transparansi, dan distribusi harta yang adil. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk bantuan dan distribusi harta harus dilakukan secara adil, memastikan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ketidakadilan dalam pembagian bantuan PKH, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu YN dan Ibu TMJ, jelas melanggar prinsip ini. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada keluarga miskin justru diterima oleh keluarga mampu, yang tidak hanya menciptakan ketidakadilan tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di masyarakat. Transparansi adalah elemen penting lainnya dalam ekonomi Islam, di mana proses pendataan, seleksi, dan distribusi bantuan harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai keadilan dari proses tersebut. Dugaan adanya penerimaan bantuan oleh keluarga mampu karena hubungan dekat dengan aparat kelurahan menunjukkan kurangnya transparansi dalam proses seleksi penerima PKH. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut dan mengurangi efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Untuk menyelaraskan pelaksanaan program PKH dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, perlu ada perbaikan sistem pendataan dan seleksi penerima bantuan, pengawasan yang lebih ketat, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi yang lebih baik. Sistem pendataan harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Selain itu, perlu ada mekanisme verifikasi dan audit independen untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan valid. Pengawasan yang lebih ketat dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga non-pemerintah, untuk memonitor pelaksanaan program secara transparan dan adil. Dengan menerapkan prinsip keadilan, bantuan PKH akan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan tujuan utama program ini. Distribusi harta yang adil, seperti yang diamanatkan dalam ajaran Islam, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, bantuan PKH dapat lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu keluarga yang benar-benar membutuhkan,

selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kesejahteraan memiliki empat indikator utama, yang pertama adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi landasan dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah tercapai jika kita melanggar aturan Allah SWT. Melanggar aturan Allah justru menjadi penyebab hilangnya kesejahteraan manusia. (QS. Thaha:124).

الْيَوْمَ أَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ تَرْكُمْ  
وَمَا أَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta." (QS. Thaha).

Kesejahteraan tidak dapat diraih tanpa kegiatan ekonomi. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil ini menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan, sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena semua akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur berdasarkan beberapa variabel, antara lain:

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan meliputi:
  - 1) Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan pemberdayaan.
  - 2) Persepsi masyarakat akan keadilan dari hasil pembangunan yang merata.
  - 3) Keterjangkauan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, pendapatan, pendidikan, serta peningkatan perhatian terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Aspek- aspek yang menjadi pertimbangan meliputi:
  - a. Peningkatan kehidupan yang merata di masyarakat.
  - b. Peningkatan pendapatan dan pengurangan ketimpangan pendapatan.
  - c. Meningkatnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat.
  - c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa.

Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan meliputi:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana perekonomian yang lebih banyak untuk mendukung kehidupan masyarakat.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

## **2. Dampak dari perubahan status peserta PKH dari tidak mampu menjadi mampu dalam perspektif ekonomi islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam, perubahan status peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari tidak mampu menjadi mampu memiliki dampak yang signifikan. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa ekonomi Islam memiliki landasan yang berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Pada dasarnya, ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, dan distribusi yang adil atas kekayaan. Dengan demikian, perubahan status peserta PKH dari tidak mampu menjadi mampu harus dilihat melalui lensa prinsip-prinsip ini

Salah satu dampak yang paling mencolok adalah peningkatan tanggung jawab sosial individu yang mengalami perubahan status. Dalam Islam, ada konsep zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan. Ketika individu yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu, mereka diharapkan untuk lebih aktif dalam memberikan kontribusi sosial dan membantu sesama yang masih

membutuhkan. Hal ini mencerminkan prinsip kepedulian dan saling membantu yang sangat ditekankan dalam Islam

Namun demikian, perubahan status ini juga dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah individu yang mampu, terdapat potensi peningkatan dalam sirkulasi uang dan investasi di sektor-sektor produktif. Ini dapat menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa ekonomi

Islam juga menekankan pada keadilan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa peningkatan kekayaan ini tidak menyebabkan terjadinya ketimpangan yang lebih besar dalam masyarakat. Prinsip keadilan ekonomi Islam menuntut agar distribusi kekayaan dilakukan secara merata dan adil, sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya.z

Selain itu, perubahan status peserta PKH juga dapat memiliki dampak pada kesejahteraan individu dan keluarga yang bersangkutan. Dengan menjadi mampu, mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai fasilitas dan layanan, seperti pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan yang lebih berkualitas, dan peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada pentingnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup semua individu dalam masyarakat.

Namun, ada juga potensi risiko yang perlu diperhatikan dalam perubahan status ini. Salah satunya adalah potensi terjadinya kesombongan atau kesenjangan sosial antara mereka yang mampu dan yang tidak mampu. Dalam Islam, kesederhanaan dan sikap rendah hati sangat ditekankan, dan kemakmuran materi tidak boleh menjadi alat untuk merendahkan orang lain atau menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perubahan status ini tidak menyebabkan terjadinya ketegangan sosial atau perpecahan dalam masyarakat

Dalam konteks ekonomi Islam menurut Muhammad Yunus selaku pencetus teori ekonomi islam yaitu, pengelolaan dan redistribusi kekayaan perlu dilakukan dengan bijaksana dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi dimanfaatkan secara efisien dan adil demi kesejahteraan semua anggota masyarakat.

Tabel 4.1  
Percentase PKH dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat

No	Kriteria	Jumlah penerima	Persentase	Keterangan
1	Memiliki usaha	231	33,3	Usaha tambak ikan, toko kelontong, jual minuman, jual makanan ringan, warung sarapan pagi, salon

				kecantikan, cuci motor, pembuatan kerupuk ikan, jasa sewa perahu, tambal ban, dan lain sebagainya
2	Belum memiliki usaha	462	66,7	

*Sumber data Kantor Kecamatan Kelurahan Simpang III Sipin<sup>60</sup>*

Berdasarkan pernyataan dari penerima PKH dan hasil wawancara dengan masyarakat, terlihat bahwa program PKH di Simpang III Sipin telah membantu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan. Evaluasi dan graduasi akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi, di mana ada dua model graduasi

“Sebelumnya, saya bergantung sepenuhnya pada bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun, setelah mengikuti program pelatihan dan pemberdayaan dari PKH, saya berhasil meningkatkan produksi pertanian saya dan membuka usaha kecil-kecilan berupa warung dengan dana PKH. Kini, saya dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepenuhnya mengandalkan bantuan PKH”<sup>61</sup>

Perubahan status Ahmad dari peserta PKH yang tidak mampu menjadi mampu telah memberikan dampak positif pada kehidupan ekonominya. Dengan meningkatkan kemampuan dalam usaha pertanian dan membuka usaha kecil-kecilan, Ahmad tidak hanya mengurangi ketergantungannya pada bantuan PKH, tetapi juga meningkatkan pendapatannya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bersama warga setempat yaitu :

“ Menurut saya, dalam perspektif ekonomi Islam, perubahan status saya merupakan wujud dari upaya untuk mandiri dan berusaha secara halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, saya merasa telah melangkah sesuai dengan ajaran ekonomi Islam yang menghargai usaha dan kerja keras”<sup>62</sup>

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan bersama warga bapak Ariyadi selaku kepala keluarga yaitu :

Dari perspektif ekonomi Islam, perubahan status Ariyadi dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai ekonomi yang dianjurkan dalam Islam, seperti usaha (ijtihad), keadilan dalam distribusi sumber daya, dan saling tolong-menolong dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan bersama warga ibu Nuraini selaku warga yang mendapat PKH yaitu :

“Untuk masa mendatang, saya berencana untuk terus mengembangkan usaha

pertanian dan warung kecil-kecilan saya. Saya juga ingin memanfaatkan pelatihan dan bantuan yang masih tersedia dari PKH untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berwirausaha. Selain itu, saya akan terus berusaha secara halal dan berdoa agar usaha saya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitar”<sup>63</sup>

Rencana Darwin untuk terus mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu mengembangkan potensi dan berusaha secara halal untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dari wawancara dengan warga yang mendapat PKH, dapat disimpulkan bahwa perubahan status dari peserta PKH yang tidak mampu menjadi mampu memiliki dampak positif pada kehidupan ekonomi, serta sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam yang mendorong umatnya untuk berusaha, mandiri, dan saling membantu dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut para ahli ekonomi Islam, seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Umer Chapra, perubahan status dari tidak mampu menjadi mampu melalui program-program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) mencerminkan prinsip-prinsip inti ekonomi Islam. Siddiqi menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, yang dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Umer Chapra menambahkan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya pertumbuhan material, tetapi juga peningkatan kualitas hidup melalui nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan demikian, program PKH tidak hanya membantu meningkatkan taraf hidup individu secara materil tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan teori-teori ekonomi Islam yang dianut para ahli tersebut.

### **3. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran penerima bantuan PKH dalam perspektif ekonomi islam**

Dalam meningkatkan kesadaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari perspektif ekonomi Islam, terdapat beragam upaya yang dapat dilakukan berdasarkan teori-teori ekonomi Islam yang relevan. Dalam konteks ini, konsep-konsep seperti zakat, muamalah, pendidikan ekonomi Islam, manajemen risiko, dan kepemilikan memiliki peran yang penting.

Pertama-tama, zakat adalah salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam. Penerapan konsep zakat dalam PKH dapat membantu meningkatkan kesadaran penerima bantuan tentang konsep kewajiban memberi dalam agama Islam. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan mendorong penerima bantuan PKH untuk membayar zakat dari pendapatan mereka, mereka dapat lebih memahami pentingnya berbagi rezeki kepada sesama dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, prinsip muamalah (transaksi) dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam segala aspek kegiatan ekonomi. Dalam konteks PKH, penerima bantuan dapat didorong untuk terlibat dalam transaksi ekonomi yang adil dan bertanggung jawab, seperti berdagang atau berinvestasi dalam usaha kecil. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip muamalah ini, diharapkan kesadaran penerima bantuan terhadap tanggung jawab sosial mereka dalam aktivitas ekonomi akan meningkat.

Ketiga, pendidikan ekonomi Islam merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesadaran ekonomi penerima bantuan PKH. Melalui pelatihan, seminar, atau program pendidikan yang disesuaikan, penerima bantuan dapat diberikan pemahaman yang lebih

baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk konsep-konsep seperti kepemilikan, keadilan, dan keberkahan rezeki. Pendidikan ini juga dapat membantu penerima bantuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan ekonomi yang berguna dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Keempat, konsep manajemen risiko dalam ekonomi Islam dapat membantu penerima bantuan PKH dalam mengelola risiko dalam kegiatan ekonomi mereka. Melalui pemahaman tentang prinsip-prinsip bagi hasil dalam investasi atau asuransi syariah, mereka dapat meminimalkan risiko finansial dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan mereka. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya manajemen risiko dalam konteks ekonomi Islam dapat membantu penerima bantuan PKH untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Kelima, konsep kepemilikan juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran ekonomi penerima bantuan PKH. Dengan mendorong mereka untuk memiliki aset produktif, seperti tanah atau usaha kecil, mereka dapat mengembangkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Selain itu, kepemilikan aset juga dapat memberikan rasa memiliki dan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih keras dalam mencapai tujuan ekonomi mereka. Secara keseluruhan, upaya-upaya ini, yang didasarkan pada teori-teori ekonomi Islam, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemandirian ekonomi penerima bantuan PKH, serta menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Simpang III Sipin mengenai upaya meningkatkan kesadaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari perspektif ekonomi Islam:

Dalam wawancara dengan pihak Kelurahan Simpang III Sipin, terungkap bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran penerima bantuan PKH dalam perspektif ekonomi Islam. Salah satu langkah yang diambil adalah melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi tentang konsep-konsep ekonomi Islam kepada penerima bantuan PKH.

Menurut mereka, salah satu aspek penting yang ditekankan dalam program pelatihan adalah konsep zakat. Penerima bantuan diajarkan tentang kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari prinsip ekonomi Islam. Mereka diberikan pemahaman tentang penggunaan zakat untuk redistribusi kekayaan dan membantu mereka memahami pentingnya berbagi rezeki kepada sesama.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Purwanto yang menyatakan mengenai idikator upaya yaitu sebagai berikut :

"Kami telah melaksanakan program pelatihan tentang kewajiban membayar zakat bagi penerima bantuan PKH. Mereka kami ajarkan pentingnya zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dan sebagai bagian dari kewajiban dalam Islam. Kami berharap, dengan memahami dan melaksanakan zakat, penerima bantuan dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial."<sup>64</sup>

Maka dari itu, diharapkan penerima bantuan dapat memahami dan melaksanakan kewajiban zakat dengan baik. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial di antara sesama umat.

Sejalan dengan hasil wawancara Bapak Masli yang menyatakan mengenai idikator upaya yaitu sebagai berikut :

"Penerima bantuan PKH didorong untuk terlibat dalam transaksi ekonomi yang adil

dan bertanggung jawab, seperti membuka usaha kecil atau berdagang. Prinsip muamalah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial selalu kami tekankan dalam setiap kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.”<sup>65</sup>

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi, penerima bantuan PKH didorong untuk terlibat dalam transaksi ekonomi yang adil dan bertanggung jawab, seperti membuka usaha kecil atau berdagang. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur tanpa adanya unsur penipuan atau riba, menjaga keadilan dengan memberikan hak setiap pihak yang terlibat, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, penerima bantuan PKH tidak hanya dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ekonomi yang lebih adil dan berkah sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Nilawaty yang menyatakan mengenai idikator upaya yaitu sebagai berikut :

“Kami bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ini mencakup tabungan syariah dan pembiayaan mikro berbasis syariah. Layanan ini membantu penerima bantuan mengelola keuangan mereka secara Islami dan lebih efektif.”<sup>66</sup>

Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam didasarkan pada teori-teori utama dalam ekonomi Islam, seperti konsep maqashid al-shariah dan prinsip-prinsip muamalah. Maqashid al-shariah menekankan tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, ini berarti memastikan bahwa aktivitas keuangan harus mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip muamalah mengatur transaksi ekonomi dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, serta menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Dengan menerapkan tabungan syariah dan pembiayaan mikro berbasis syariah, penerima bantuan dapat mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, menghindari praktik-praktik yang diharamkan, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Nur Lestary yang menyatakan mengenai idikator upaya yaitu sebagai berikut :

“Kami memberikan pemahaman kepada penerima bantuan PKH tentang manajemen risiko, termasuk prinsip bagi hasil dalam investasi atau asuransi syariah. Ini penting agar mereka dapat mengelola risiko finansial dengan lebih bijaksana dan mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik”<sup>67</sup>

Dengan demikian, pihak Kelurahan Simpang III Sipin berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian ekonomi penerima bantuan PKH sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Selain itu, pihak Kelurahan Simpang III Sipin juga telah mengintegrasikan prinsip-prinsip muamalah (transaksi) dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan penerima bantuan PKH. Mereka diberdayakan untuk terlibat dalam transaksi ekonomi yang adil dan bertanggung jawab, seperti membuka usaha kecil atau berdagang. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka akan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Selain upaya dalam penyuluhan dan pelatihan, pihak Kelurahan Simpang III Sipin juga mencatat bahwa mereka telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan

syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bagi penerima bantuan PKH. Hal ini mencakup penyediaan produk-produk keuangan seperti tabungan syariah atau pembiayaan mikro berbasis syariah yang dapat membantu mereka mengelola keuangan mereka secara Islami

Selanjutnya, pihak kelurahan juga memperkuat pendekatan manajemen risiko dalam mendukung penerima bantuan PKH. Mereka menyediakan pemahaman tentang prinsip bagi hasil dalam investasi atau asuransi syariah, yang dapat membantu penerima bantuan dalam mengelola risiko finansial mereka dengan lebih efektif.

Terakhir, pihak Kelurahan Simpang III Sipin juga menggalakkan program-program yang mendorong penerima bantuan PKH untuk memiliki aset produktif. Melalui berbagai pelatihan dan bimbingan, mereka didorong untuk memiliki usaha kecil atau menanam modal dalam bentuk aset yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa pihak Kelurahan Simpang III Sipin telah mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian ekonomi penerima bantuan PKH, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Upaya mereka mencakup penyuluhan, pelatihan, penyediaan layanan keuangan syariah, manajemen risiko, dan pemberdayaan ekonomi berbasis aset. Semua ini bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi penerima bantuan PKH dan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, Program Keluarga Harapan (PKH) mengadopsi beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Syarat-syarat tersebut terbagi dalam tiga komponen utama: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan mencakup ibu hamil, nifas, menyusui, dan anak usia dini 0-6 tahun yang belum bersekolah. Komponen pendidikan mencakup anak usia sekolah 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, dengan jenjang pendidikan mulai dari SD/MI hingga SMA/MA atau sederajat. Komponen kesejahteraan sosial mencakup lanjut usia yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan penyandang disabilitas.

Penerima PKH di Kecamatan Danau Teluk menerima bantuan dalam dua jenis: bantuan tetap sebesar Rp.550.000,- per keluarga per tahun dan PKH Akses sebesar Rp.1.000.000,- per keluarga per tahun. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang yang dikirim langsung oleh Kementerian Sosial ke rekening bank masing-masing KPM atau diambil melalui kantor pos jika tidak memiliki rekening. Penyaluran dana dilakukan bertahap dalam empat periode setiap tahun, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember

Proses pemilihan penerima PKH harus dilakukan dengan sangat hati-hati berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Babinsa Mardianto. Proses seleksi yang tepat akan memastikan bantuan mencapai mereka yang paling membutuhkan, sesuai dengan ajaran ekonomi Islam yang mengedepankan distribusi harta secara adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Transparansi dan akurasi data sangat penting dalam proses ini untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan

Bapak Efrizal menjelaskan bahwa proses pemilihan penerima bantuan PKH di Kelurahan dilakukan melalui pendataan oleh kader-kader di tingkat RT dan RW, yang mengumpulkan data mengenai kondisi ekonomi dan sosial warga, termasuk pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi tempat tinggal. Setelah data dikumpulkan, verifikasi dilakukan melalui kunjungan lapangan oleh tim dari kelurahan untuk memastikan bahwa keluarga terdaftar memang memenuhi kriteria sebagai keluarga kurang mampu.

Meskipun proses pendataan dan verifikasi telah dilakukan, ada pandangan beragam

mengenai pelaksanaan PKH di masyarakat. Ibu Dahlia mengapresiasi program PKH yang membantu keluarga kurang mampu dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak, namun mencatat adanya masalah pelaksanaan. Beberapa keluarga yang tergolong mampu mendapatkan bantuan PKH, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga yang benar-benar membutuhkan.

Ibu Titik Sutisna menambahkan bahwa ada beberapa keluarga dengan kondisi ekonomi cukup baik yang masih menerima bantuan PKH. Hal ini diduga terjadi karena hubungan dekat antara keluarga penerima dan aparat kelurahan. Ketidakadilan dan penyimpangan dalam penyaluran bantuan PKH ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan distribusi harta yang adil.

Untuk menyalaraskan pelaksanaan program PKH dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan dan seleksi penerima bantuan, pengawasan yang lebih ketat, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi yang lebih baik. Sistem pendataan harus mampu mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan, dan mekanisme verifikasi serta audit independen harus memastikan data yang dikumpulkan akurat dan valid.

Dampak dari perubahan status peserta PKH dari tidak mampu menjadi mampu dalam perspektif ekonomi Islam mencakup peningkatan tanggung jawab sosial individu yang mengalami perubahan status. Konsep zakat mengajarkan kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada yang membutuhkan. Ketika individu menjadi mampu, mereka diharapkan lebih aktif dalam memberikan kontribusi sosial dan membantu sesama.

Perubahan status juga dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah individu yang mampu, terdapat potensi peningkatan sirkulasi uang dan investasi di sektor produktif, yang dapat mengerakkan roda ekonomi. Namun, penting untuk memastikan bahwa peningkatan kekayaan tidak menyebabkan ketimpangan yang lebih besar, sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Perubahan status peserta PKH juga berdampak pada kesejahteraan individu dan keluarga yang bersangkutan. Dengan menjadi mampu, mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang peningkatan keterampilan dan pendapatan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup semua individu.

Namun, perubahan status ini juga membawa potensi risiko, seperti kesombongan atau kesenjangan sosial antara yang mampu dan tidak mampu. Dalam Islam, kesederhanaan dan sikap rendah hati sangat ditekankan. Penting untuk memastikan perubahan status tidak menyebabkan ketegangan sosial atau perpecahan dalam masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan dan redistribusi kekayaan perlu dilakukan dengan bijaksana berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi dimanfaatkan secara efisien dan adil demi kesejahteraan semua anggota masyarakat.

Evaluasi dampak PKH menunjukkan bahwa program ini telah membantu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan. Misalnya, seorang peserta PKH berhasil meningkatkan produksi pertaniannya dan membuka usaha kecil-kecilan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepenuhnya mengandalkan bantuan PKH.

Perubahan status dari peserta PKH yang tidak mampu menjadi mampu menunjukkan dampak positif pada kehidupan ekonomi. Mereka yang berhasil meningkatkan usaha dan pendapatan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bantuan PKH, tetapi juga

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, ini merupakan wujud upaya mandiri dan usaha halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Upaya meningkatkan kesadaran penerima bantuan PKH dalam perspektif ekonomi Islam mencakup berbagai aspek. Pertama, penerapan konsep zakat membantu meningkatkan kesadaran tentang kewajiban memberi dalam agama Islam dan fungsi zakat sebagai alat redistribusi kekayaan. Kedua, prinsip muamalah menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi, yang dapat diterapkan dalam transaksi ekonomi yang adil dan bertanggung jawab

Ketiga, pendidikan ekonomi Islam melalui pelatihan dan program pendidikan dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keempat, konsep manajemen risiko dalam ekonomi Islam membantu penerima bantuan PKH mengelola risiko finansial dengan lebih bijaksana. Kelima, mendorong kepemilikan aset produktif dapat mengembangkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya-upaya ini telah dilakukan oleh pihak Kelurahan Simpang III Sipin. Mereka melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi tentang konsep-konsep ekonomi Islam kepada penerima bantuan PKH, termasuk kewajiban membayar zakat. Mereka juga mendorong keterlibatan dalam transaksi ekonomi yang adil dan bertanggung jawab serta bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan keuangan Islami

Pendekatan manajemen risiko dan dorongan untuk memiliki aset produktif juga diterapkan untuk membantu penerima bantuan PKH mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik. Langkah-langkah konkret ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemandirian ekonomi penerima bantuan PKH sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## KESIMPULAN

1. Dalam perspektif ekonomi Islam, pihak kelurahan Simpang 3 Sipin belum sepenuhnya berhasil dalam menerapkan prinsip keadilan dan transparansi yang diamanatkan. Hal ini terbukti dari masih adanya ketidaksesuaian dalam alokasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), di mana beberapa penerima manfaat yang terdaftar sebenarnya masuk dalam kategori mampu. Ketidakakuratan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang lebih membutuhkan, mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem penyaluran bantuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam.
2. Perubahan status peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari tidak mampu menjadi mampu memiliki dampak signifikan dalam perspektif ekonomi Islam. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dan kesejahteraan sosial, di mana distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya. Ketika peserta PKH yang sudah mampu tetap menerima bantuan, hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, di mana bantuan yang seharusnya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan menjadi tersendat.
3. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran penerima bantuan PKH dalam perspektif ekonomi Islam. Ini termasuk pelaksanaan program pelatihan dan sosialisasi mengenai konsep zakat, muamalah (transaksi ekonomi yang adil dan bertanggung jawab), serta manajemen risiko dan kepemilikan aset produktif. Penerima bantuan juga didorong untuk terlibat dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diberikan akses ke layanan keuangan

Islami melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

### **Saran**

#### **1. Pendekatan Multidisipliner:**

Para peneliti sebaiknya menggunakan pendekatan multidisipliner yang melibatkan ilmu ekonomi, sosial, dan agama untuk memahami secara komprehensif dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif ekonomi Islam. Ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam tentang efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat.

#### **3. Pengumpulan Data Primer:**

Penting untuk melakukan pengumpulan data primer melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan penerima PKH dan pemangku kepentingan terkait. Data ini akan memberikan wawasan langsung tentang pengalaman, tantangan, dan manfaat yang dirasakan oleh penerima bantuan.

#### **4. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif**

Gunakan kombinasi analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas program. Analisis kuantitatif dapat mengukur perubahan ekonomi, sementara analisis kualitatif dapat mengeksplorasi aspek sosial dan spiritual dari perspektif ekonomi Islam.

#### **5. Studi Perbandingan:**

Lakukan studi perbandingan dengan daerah lain yang menerapkan program serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan umum. Ini akan membantu dalam menyusun rekomendasi yang lebih tepat sasaran dan relevan.

#### **6. Kolaborasi dengan Institusi Lokal:**

Kerjasama dengan institusi lokal, seperti universitas, lembaga keuangan syariah, dan organisasi non-pemerintah, akan memperkaya penelitian dengan perspektif lokal dan mendukung implementasi rekomendasi yang dihasilkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020. Jember: Deepublish.
- Amir,S., & Sembiring, U.D.N. (2022). Evaluasi Sosial : Kajian Sosiologi Islam. Nas Media Pustaka.
- Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Hidayat, A. A. (2021). Studi Kasus Keperawatan; Pendekatan Kualitatif. Bansung: Health Books Publishing. 1-67
- Idris, H. (2023) Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jakarta: Prenada Media. 1-50
- Marzali, A. (2002). Strategi peisian Cikalang dalam menghadapi Kemiskinan. Yayasan Obor Indonesia. 1-102
- Noor, Juliansyah (2011). "Metodelogi penelitian." Jakarta: Kencana Prenada Media Group 183
- Ramdhani, M. (2021). Metode penelitian. Bandung: Cipta Media Nusantara.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Bandung : Deepublish. 1-63
- Rizayani, S., & Syaharuddin, M. R. N. H. (2023). 7. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. Kajian- Kajian Lokal Kalimantan Selatan, 65.
- Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif. Jakarta : PT Kanisius. 1-53
- Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Grasindo.1-101
- Sembiring, T. B., & SH, M. (2022). Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep Dan Teori). Penerbit Adab.
- Uhar Suharsaputra, (201), Metode Penelitian, Bandung: PT Refika Aditama. 1-102
- Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi Syariah. Surakarta:Penerbit Aria Mandiri Group. 47

## Jurnal- Jurnal

- Antoro, H., (2016). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dibidang Pendidikan Di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (E-Journal)*, 4(4).
- Annisa, NMO, & Novira, A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* , 26 (1), 29-50.
- Dewi Taurisiawati, R., & Yona Desni, S. (2019). Pola makan dan pendapatan keluarga dengan kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil trimester II. *Holistik: Jurnal Kesehatan*, 13(1), 7-18.
- Dianto, A. Y., Hendratri, B. G., Zakariya, M., & Udin, M. F. (2023). Strategi Sukses Produksi Berbasis Ekonomi Islam: Studi Kasus Produksi Nucless di PT. Persada Nawa Kartika Kertosono. *Journal on Education*, 6(1), 10496-10502.
- Ernawati, T., Lisnawati, T., Fariati, W. T., Nurhayati, S., Nuraeni, Y., Fazrin, Q. S. E., ... & Auladina, S. (2022). Klaster Bisnis Sebagai Strategi Dalam Pendampingan Ukmk Pada Keluarga Penerima Manfaat Pkh Di Kampung Rawey Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 489-494.
- Hansen, S. (2020). Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283.
- Hilmi, H., Nasir, M., Ramlawati, R., & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20-27.
- Janah, M. (2023). Transfer Kapital: Studi Praktik Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 65-86.
- Kustomo, K., Nuha, MU, Susilowati, M., Aghnia, TB, & Pradani, HGAW (2022). Besi Sebagai Unsur Kimia Dari Langit: Tinjauan Sains Dan Al- Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* , 17 (2), 99-106.
- Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 220-229.
- Mely, E. P. S., Rumzi, S., & Jamhur, P. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Meral Kabupaten Karimun) (Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Putri, F. I., Damayanti, R., & Kismiantini, K. (2022, May). Penerapan Algoritma K- Means Untuk Mengelompokan Kecamatan Di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Program Keluarga Harapan. In Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Statistika (Vol. 2).
- Rizayani, S., & Syaharuddin, MRNH (2023). 7. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kota Banjarbaru. *Kajian-Kajian Lokal Kalimantan Selatan* , 65-72
- Saragih, O. K. (2022). Kajian Kritis Oscar Lewis terhadap Pendidikan, Pola Asuh dan Kemiskinan Kebudayaan Studi Kasus Profil Kehidupan Pengemis Ibu Nurul Aini di Masjid Raya Al-Mashun Medan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7402-7408.
- Sari, I., Hilda, H., & Fakhriana, F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(5), 296-307.
- Yusman, Y., Putri, R. E., & Amelia, L. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Pioritas Masyarakat Yang Layak Mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Klambir Lima. *INTECOMS: Journal Of Information Technology And Computer Science*, 6(1), 101-10